

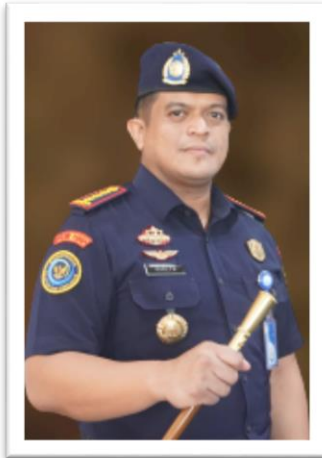


LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN III TAHUN 2022



**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
2022**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2022. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada triwulan III tahun 2022. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 14 Oktober 2022

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Harlyn Raya maharbhakti, S.Pi, M.Si
NIP. 19800314 200312 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) triwulan III tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2022 pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 7 Sasaran Kegiatan dan 26 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) pada Triwulan III adalah 111,63 % dari 11 Indikator Kinerja yang telah dilakukan pengukurannya pada Triwulan III tahun 2022 dan 15 Indikator Kinerja tidak dilakukan pengukuran di Triwulan III.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2022 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2021 sebesar Rp42,73 miliar dengan realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2022 Rp28,60 miliar atau 66,93% yang mana ada pengurangan pagu karena adanya Automatic Adjustment senilai Rp5,33 miliar sehingga capaian realisasi riil adalah 76,48 %. Pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaksanakan untuk mendukung Program Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada kegiatan Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speed Boat serta kegiatan Pengawasan Kapal Perikanan dan Pengawasan Pembudidayaan Ikan, kegiatan pengawasan Kawasan Konservasi serta Pengawasan Kegiatan Penangkapan ikan yang merusak (Destructive Fishing).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	7
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2022	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja TW II Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung TW II Tahun 2022	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Akuntabilitas Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Rekomendasi	58
4.3 Rencan Tindak Lanjut	58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022	10
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja TW II Tahun 2021	14
Tabel 3	Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III 2022	17
Tabel 4	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III Tahun 2022	18
Tabel 5	Daftar Penanganan TPKP Sampai dengan TW III Tahun 2022	48
Tabel 6	Daftar Penanganan Barang Bukti TPKP sampai dengan TW III Tahun 2022	49
Tabel 7	Daftar Penanganan ABK TPKP sampai dengan TW III Tahun 2022	50
Tabel 8	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW III Tahun 2022	53
Tabel 9	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW III Tahun 2022	54
Tabel 10	Realisasi Anggaran Perkegiatan Sampai dengan TW III Tahun 2022	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2022 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada tahun 2022 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja triwulan III tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
 - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
 - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (bius dan bom ikan), penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.
2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
 - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
 - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
 - b. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom.
 - b. Eksploitasi mangrove.
 - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2022.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

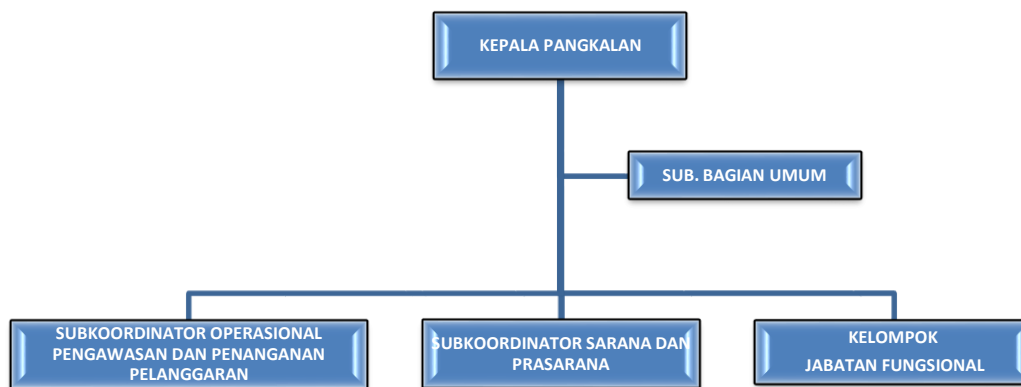
b. Kepala Subbagian Umum

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan..

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. Dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.

- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) triwulan III tahun 2022 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2022; dan
4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2022 dan rekomendasi perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 – 2024.

Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (*sovereignty*) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

5. Peta Strategi dan Sasaran Kegiatan

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

a. *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b. *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c. *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

d. *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran Kegiatan merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2022 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2022 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan

Perikanan, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
 - a. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
 - b. Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - c. Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
 - d. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
 - b. Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
 - b. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
 - c. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - e. Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
 - f. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - b. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - c. Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - d. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang diperiksa kepatuhannya
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a. Layanan BMN
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat
 - c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - d. Layanan Umum
 - e. Layanan Data dan Informasi
 - f. Layanan Perkantoran
 - g. Layanan Sarana Internal
 - h. Layanan Manajemen SDM
 - i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

- j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- k. Layanan Manajemen Keuangan
- l. Layanan Reformasi Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2022 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK1.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan	ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (%)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%)	100
KEGIATAN 3. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	87

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	yang partisipatif			
SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	87,5
		ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	87,5
		ISK3.2.3	Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100
		ISK3.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan (%)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif	ISK4.1.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.2	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.3	Persentase Efektivitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		ISK4.1.4	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
		ISK4.1.5	Persentase Efektivitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Pendaratan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	80
		ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Bitung (nilai)	
		ISK5.1.4 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	77
		ISK5.1.5 Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	90
		ISK5.1.6 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		ISK5.1.7 Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (inovasi)	1
		ISK5.1.8 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	75
		ISK5.1.9 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	75
		ISK5.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	86
		ISK5.1.11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	70
		ISK5.1.12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	89
		ISK5.1.13 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	81

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.

3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).

4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.

5. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).

6. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi Kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>) yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan III Tahun 2022 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 111,63.

Gambar 3. Capaian Kinerja triwulan III Tahun 2022



Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 111,63% apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja ditriwulan III tahun 2021 yakni 112% maka terdapat penurunan sebesar 0,37%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan beberapa indikator kinerja serta formulasi penghitungan capaian kinerjanya dalam manual iku.

Pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target 2022	Target SEPTEMBER	Capaian SEPTEMBER	%
S.01	SK1.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan yang sesuai ketentuan						120.00
ISK1.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan	%	Maximize	100	75	100	120.00
S.02	SK2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan yang sesuai ketentuan						100.00
IKS.02.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan	%	Maximize	100	100	100	100.00
S.03	SK3.1 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif						
ISK3.1.1	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP	%	Maximize	87	0		

S.04	SK3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						111.11
ISK3.2.1	Indeks kinerja operasional kapal pengawas	Indeks	Maximize	87,5	0		
ISK3.2.2	Indeks kinerja operasional speedboat pengawas	Indeks	Maximize	87,5	0		
ISK3.2.3	Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	90	90	100	111.11
S.05	SK3.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
ISK3.3.1	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	%	Maximize	100	0		
ISK3.3.2	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	%	Maximize	100	0		
S.06	SK4.1 Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang efektif						115.00
ISK4.1.1	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	%	Maximize	93	75	100	120.00
ISK4.1.2	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	%	Maximize	93	75	100	120.00
ISK4.1.3	Persentase Efektifitas Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	%	Maximize	93	75	100	120.00
ISK4.1.4	Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	%	Maximize	80	0	100	100.00
ISK4.1.5	Persentase Efektifitas Koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	%	Maximize	80	0		
S.07	SK5.1 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP						112.02
ISK5.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	86	86	100	116.28
ISK5.1.11	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	70	70	70	100.00
ISK5.1.1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Standar Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	Indeks	Maximize	80	80	90,55	113.19
ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	NILAI	Maximize	89	0		
ISK5.1.2	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Pendaratan Ikan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (indeks)	Indeks	Maximize	80	80	90,94	113.68
ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	81	0		
ISK5.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	NILAI	Maximize	75	0		

ISK5.1.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	77	0		
ISK5.1.5	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	NILAI	Maximize	90	0		
ISK5.1.6	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	21	0		
ISK5.1.7	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Inovasi	Maximize	1	0		
ISK5.1.8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	75	0		
ISK5.1.9	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	75	0		

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 12 Oktober 2022)

Warna	Keterangan
Baik	≥ 100
Cukup	$70 - < 100$
Kurang	< 70
Belum ada penilaian	
Belum Input Capaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan triwulan III tahun 2022, telah dilakukan pengukuran terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, 11 indikator kinerja dapat tercapai $\geq 100\%$ dengan capaian hijau, sementara 15 indikator kinerja pengukurannya dilaksanakan di TW IV.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja triwulan III tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja triwulan III tahun 2022 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sasaran Kegiatan 1.1:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Capaian Sasaran Kegiatan 1.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan didukung dengan IKU Presentase penyelesaian

pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, target kinerja pada triwulan III 2022 adalah 75% dengan capaian kinerja pada triwulan III tahun 2022 adalah 100% sehingga presentase capaian TW II adalah 120%. Capaian IKU pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai capaian, dikarenakan memiliki capaian dengan nilai maksimal yaitu 120%.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp729.668.000 dan sudah terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah Rp194.582.036 persentase realisasi anggaran triwulan III tahun 2022 adalah 26,67%.

IKU1 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target capaian IKU penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada triwulan III tahun 2022 adalah 75% dan tercapai 100%, dengan presentase capaian kinerja 120%.

Tabel 3. Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW III 2022

IDIKATOR KINERJA	2021			2022		
	TARGET TW II	REALISASI	%	TARGET TW I	REALISASI	%
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	75	100	120	75	100	120

Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan. Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Jumlah Pelaku Usaha yang diperiksa	Presentase Capaian Pemeriksaan Tahun 2021
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi	2	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	10	100
3.	Pengawasan pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	9	100
4.	Pengawasan pencemaran perikanan non perikanan	14	100
5.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	6	6
6.	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak	59	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		100	100

Rincian informasi capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja di tahun 2022, sebagai berikut:

1. Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yangdiperiksa kepatuhannya

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung sampai dengan Triwulan III 2021 telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dua unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dengan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan 100%, pelaksanaan kegiatan pengawasan yaitu terhadap:

1. PT. Rohtadi yang merupakan unit pengolahan ikan (sirip ikan hiu kering) yang beralamat di Jln. Perkamil Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado. Lokasi pemeriksaan bertempat di Gudang penyimpanan Jl. Perintis Rt/Rw 004/002 Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diolah. Hasil pemeriksaan didapati bahwa PT. Rohtadi memiliki dokumen perizinan meliputi SIUP, dan SKP, SIPJI Wilayah Sulut.
2. UD. Golden Ocean Aquarium merupakan Perdagangan Eceran Ikan Hias yang beralamat di Kel.Minanga No.16, Lingkungan VII, Kel. Malalayang Satu, Kec. Malalayang, Kota Manado. Pengawasan jenis ikan dilindungi di UD. Golden Ocean Aquarium meliputi pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan dan kesesuaian jenis ikan yang diperjualbelikan, hasil pemeriksaan UD. Golden

Ocean Aquarium telah memiliki dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan jenis ikan yang pada UD. Golden Ocean Aquarium yang ditemukan adalah Banggai Cardinal Fish (*Pterapogon kauderni*) yang telah sesuai dengan KEPMEN-KP Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*).

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 43.674.000 dan terealisasi sampai dengan TW III tahun 2022 adalah Rp 11.981.392 atau 27,43%.

2. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2022 meliputi pengawasan pelaku usaha pasir laut dan SDNH lainnya dan pengawasan pelaku usaha wisata bahari.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2022 sebesar Rp93.609.000 terealisasi sebesar Rp41.930.495 dengan persentase penyerapan anggaran 44,79%.

Rincian kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaku Usaha Produk Kelautan

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengelolaan pasir laut dan SDNH lainnya sampai dengan TW III tahun 2022 sebanyak 3 unit usaha. Pengawasan terhadap perusahaan pasir laut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP nomor: KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perusahaan Pasir Laut, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

1. PT. Kulaka Jaya Perkasa jenis usaha yang dijalankan Penambangan pasir laut yang beralamat di Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kab. Pasangkayu Prov. Sul-Bar hasil pengawasan menunjukkan bahwa unit usaha tersebut telah memiliki dokumen perizinan berupa izin usaha pertambangan dan izin lokasi.
2. PT. Samudra Pantoloan jenis usaha yang dijalankan Penambangan pasir laut yang beralamat di Jl. Pemuda No. 01, RT. 012/RW. 003 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu hasil pengawasan menunjukkan bahwa unit usaha tersebut telah memiliki dokumen perizinan berupa izin usaha pertambangan dan izin lokasi.
3. CV. Maju Bersama jenis usaha yang dijalankan Penambangan pasir sungai yang beralamat di Dusun Kalindu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kab.

Pasangkayu Sulawesi Barat, hasil pengawasan menunjukkan bahwa unit usaha tersebut telah memiliki dokumen perizinan berupa izin usaha pertambangan dan izin lokasi.

b. Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Kelautan

Pengawasan terhadap pelaku usaha jasa kelautan yaitu pengawasan pelaku usaha wisata bahari, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3/PER.DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan TW III adalah sebanyak 7 pelaku usaha dan persentase capaian pemeriksaan sebesar 100%. Rincian hasil kegiatan sampai dengan TW III tahun 2022, sebagai berikut

1. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 Maret 2022 di PT. Pantai Tasik Ria Indah yang beralamat di Desa Mokupa, Kec.Tombariri, Kab.Minahasa, Jenis usaha hotel, wisata tirta dan diving dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
2. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 Maret 2022 di PT. Manado Underwater Explorations (MUREX) yang beralamat di Desa Kalasey, Kec.Mandolang Kab.Minahasa Sulawesi Utara. Jenis usaha Wisata Selam, Cottage, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
3. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang dilaksanakan pada 22 April 2022 di Grand Luley Hotel PT. Panduharapan Nusa yang beralamat di Tongkeina, Kel. Tongkaina, Kec. Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara jenis usaha dan kegiatan yaitu Hotel, snorkeling, selam, renang, konservasi, mangrove dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar
4. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang dilaksanakan pada 22 April 2022 di Thalassa Dive Resort PT. Taman Bambu yang beralamat di Lingkungan I, Kel.Tongkaina, Kec.Bunaken jenis usaha dan kegiatan yaitu Hotel berbintang dan wisata selam dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
5. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang dilaksanakan pada 27 April 2022 di Nusantara Dian Centre Resort and Spa PT. Nusantara Dian Centre yang beralamat di Jl. Raya Molas, Lingkungan 4, Molas, Bunaken, Kota Manado jenis usaha dan kegiatan yaitu Perhotelan, snorkeling, Diving, boat tour,

olahraga pantai dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

6. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang dilaksanakan pada 26 Mei 2022 di La Merry Resort PT. La Merry Resort and Spa, yang beralamat di Tarabitan Likupang Barat, Kab.Minahasa Utara, jenis usaha dan kegiatan yaitu Akomodasi dan Hotel dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
7. Pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang dilaksanakan pada 26 Mei 2022 di Paradise Hotel PT. Manado Korin Paradise yang beralamat di Kawasan Pariwisata Paradise Desa Maen, Kab. Minahasa Utara jenis usaha dan kegiatan yaitu Penginapan, Rumah makan, snorkeling, renang, banana boat, jet ski, wahana air, spa, kolam air panas alami, dan golf dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

3. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya sampai dengan TW III tahun 2022 sebanyak 9 pelaku usaha. dengan persentase capaian penyelesaian pemeriksaan 100%.

- a. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir sampai dengan TW III tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir di PT. Bhineka Mancawisata jenis kegiatan usaha Pembangunan Infrastruktur Wisata J. W. Marriotts Hotel & Spa yang beralamat di Desa Papatungan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara hasil pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut telah memiliki izin Lokasi Nomor 530/DPMTSPD/1158/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dan izin Pelaksanaan Reklamasi nomor 503/DPMTSP/IP-REKLAMASI/1201/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020.
 2. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir di PT. TJ Silfanus jenis kegiatan usaha Pembangunan hotel, fasilitas komersil terbuka, apartemen, dermaga dan penunjangnya yang beralamat di Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki izin Lokasi nomor 530/DPMTSPD/ 1157/XI/2020 tanggal 18 November 2021 dan izin Pelaksanaan Reklamasi nomor 503/DPMTSP/IP-REKLAMASI/800/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.

- b. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan ruang laut sampai dengan TW III tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 28 Maret 2022 di Center Point Of Indonesia PT. Citraland City Losari Makassar, dokumen perizinan telah memiliki izin Lokasi reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
 2. Pengawasan pelaku pengelolaan ruang laut nasional pada tanggal 28 Maret 2022 di Makassar New Port PT. Pelindo Regional IV Makassar, dokumen perizinan Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
 3. Pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir di PT. ELNUSA PETROFIN jenis usaha yang dijalankan Depot Mini LPG Pressurized yang dberalamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sapa, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara. hasil dari pemeriksaan persusahaan tersebut telah memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh BUPATI Minahasa Selatan dan OSS.
 4. Pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir di PT. SASA INTI jenis usaha yang dijalankan Pabrik Pengolahan Kelapa dan Turunannya Jl. Trans Sulawesi KM.73, Desa Radey, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara. hasil dari pemeriksaan persusahaan tersebut telah memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh BUPATI Minahasa Selatan dan OSS.
 5. Pengawasan pelaku usaha di wilayah pesisir di PT. CARGILL INDONESIA jenis usaha yang dijalankan Pabrik Minyak Kelapa Jl. Trans Sulawesi Lingk. X, Kel. Kawangkoan Bawah, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara. hasil dari pemeriksaan persusahaan tersebut telah memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan yang dikeluarkan oleh BUPATI Minahasa Selatan dan OSS.
- c. Pengawasan Pelaku usaha Pulau-Pulau Kecil sampai dengan TW III tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di PT. Blue Bay Divers, jenis usaha yang dijalankan Pariwisata, yang berlokasi di Pulau Saronde, Kec. Ponelo Kepulauan, Kab. Gorontalo Utara. luas area yang dimanfaatkan ± 10.000 m². pada saat pemeriksaan pemilik belum dapat menunjukkan dokumen perizinan dengan alasan dalam proses pengurusan.
 2. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di PT.

Bimantara Karya Andalan, jenis usaha yang dijalankan Pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, dermaga apung, tambatan perahu yang berlokasi di Pulau Mohinggito, Kec. Ponele Kepulauan, Kab. Gorontalo Utara luas area yang dimanfaatkan ± 27.91 ha, luas perairan 4,04 ha telah memiliki dokumen perizinan namun belum memiliki dokumen PKKPR

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, ruang laut, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2022 sebesar Rp57.545.000 terealisasi sebesar Rp 17.421.101 dengan persentase penyerapan anggaran 30,27%.

4 Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: KEP.59/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan. Kegiatan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada unit usaha yang bergerak di bidang perikanan meliputi usaha pengolahan ikan dan usaha pembudidaya ikan serta unit usaha yang bergerak di bidang non perikanan meliputi usaha tambang, pembangkit listrik, dan industri minyak kelapa.

Parameter pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yaitu: a) memiliki dokumen perizinan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan); b) memiliki IPAL; c) kesesuaian IPAL terpasang.

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PLTU Anggrek, Gorontalo (PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara) jenis kegiatan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beralamat di Desa Ilangata, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan.
2. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Perikanan Nusantara jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi

- Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
3. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Bintang Mandiri Bersaudara jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 4. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Tirta Bitung Bahari jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 5. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Deho Canning Company jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 6. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Celebes Minapratama jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 7. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Manadomina Citrataruna jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 8. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Barumbun Jaya jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 9. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Mitra Jaya Samudera jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan (Pembekuan) yang beralamat di Jl. Veteran Lingk. IV, RT. 01, Kel. Manembo-Nembo, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara" hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 10. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. Delta Pasific Indotuna jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan (Ikan Kaleng) yang beralamat di Kel. Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
 11. Pegawasan pengelolaan lingkungan di PT. ELNUSA PETROFIN jenis kegiatan usaha Depot Mini LPG Pressurized yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sapa, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara hasil

pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan.

12. Pengawasan pengelolaan lingkungan di PT. SASA INTI jenis kegiatan usaha Pabrik Pengolahan Kelapa dan Turunannya yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi KM.73, Jaga IV, Desa Radey, Kec. Tenga, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara. hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
13. Pengawasan pengelolaan lingkungan di PT. CARGILL INDONESIA jenis kegiatan usaha Pabrik Minyak Kelapa yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Lingk. X, Kel. Kawangkoan Bawah, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara. hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.
14. Pengawasan pengelolaan lingkungan di PT. Samudra Mandiri Sentosa jenis kegiatan usaha Unit Pengolahan Ikan yang beralamat di Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara. hasil pemeriksaan perusahaan tersebut telah memiliki dokumen perizinan lingkungan dan memiliki IPAL Mandiri.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 83.050.000 dan terealisasi sampai dengan TW III tahun 2022 adalah Rp 18.400.000, dengan persentase realisasi anggaran adalah 22,16%.

5 Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pengawasan *destructive fishing* dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan muatan kapal yang berukuran ≤ 10 GT, menyambangi lokasi yang terindikasi terjadinya kegiatan *destructive fishing* serta menindak lanjuti aduan masyarakat terkait adanya aktifitas penggunaan bom dan bus ikan..

Informasi kinerja pengawasan pelaku usaha perikanan yang diperiksa dari kegiatan *destructive fishing* di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW II Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Kartika 09 yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
2. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Berkat Rizky yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
3. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Ampibi yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen

- lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
4. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Hendry yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 5. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Berkat Rizky-04 yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 6. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Mirdiani-03 yang berlokasi di Perairan Bitung pada tanggal 30 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 7. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. ADP yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 06 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 8. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Venio yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 06 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 9. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Afdi yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 06 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 10. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Al Annur yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 06 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 11. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Delta Cendrawasih yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 06 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 12. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Nirwana yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 07 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 13. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Merpati 88 yang berlokasi di Laut Maluku pada tanggal 07 April 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku..
 14. Telah dilakukan pengawasan terhadap Tamrin Abd Rauf yang berlokasi di Perairan Saihoa pada tanggal Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 15. Telah dilakukan pengawasan terhadap Arian Suleman yang berlokasi di Perairan Saihoa pada tanggal Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 16. Telah dilakukan pengawasan terhadap Hafrudin yang berlokasi di Perairan Padei pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap

- dan menaati peraturan yang berlaku.
17. Telah dilakukan pengawasan terhadap Kaharudin Sunusi yang berlokasi di Perairan Saihoa pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 18. Telah dilakukan pengawasan terhadap Baharudin Hasan yang berlokasi di Perairan Samarengga pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 19. Telah dilakukan pengawasan terhadap Rizal Janune yang berlokasi di Perairan Kokoila pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 20. Telah dilakukan pengawasan terhadap Zumba in L. yang berlokasi di perairan Samarengga pada tanggal 14 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 21. Telah dilakukan pengawasan terhadap Ruskin T. yang berlokasi di Perairan Padei pada tanggal 14 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 22. Telah dilakukan pengawasan terhadap Kurding yang berlokasi di Perairan Kokoila pada tanggal 14 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 23. Telah dilakukan pengawasan terhadap Tido yang berlokasi di Perairan Kokoila pada tanggal 14 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap, menaati peraturan berlaku.
 24. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Feryan Star yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 09 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 25. Telah dilakukan pengawasan terhadap M. Mekar Samudera yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 09 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 26. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Tri A yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 09 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 27. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Aqila yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 09 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 28. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Nirwana 02 yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 09 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 29. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Anugerah yang berlokasi di Laut

- Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 09 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
30. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Karya Dalbers Mandiri 01 yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku
 31. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Alberki 04 yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 32. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Karya Dalbers Mandiri yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 33. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Nafiri 01 yang berlokasi di Laut Maluku/Perairan Minahasa Tenggara pada tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 34. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Tedy II yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 35. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Nafila yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 36. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Arjoban Sawotong yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 37. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Golgota yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 38. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Velita I yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 39. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Imanuel-05 yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 11 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 40. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Burung Laut yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 41. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Nelayan 2016-38 yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan

- Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
42. Telah dilakukan pengawasan terhadap KM. Alberki 04 yang berlokasi di Perairan Manado pada tanggal 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan Dokumen lengkap dan menaati peraturan yang berlaku.
 43. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Jodi alias Odi di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan terbukti melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. Selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 44. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahul alias Alwi di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 45. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Patrick alias Husain di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. Selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 46. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Near Anwar alias Nuar di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. Selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 47. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rusmana alias Ato di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 48. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Latino alias Rini di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 49. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sudarlin Ratman Abbas alias Atu di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. Selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 50. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahman alias La Ade di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 51. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kadir Nasir alias Nasir di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara

- merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
52. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ruskin bin Hamir Pilot di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut
 53. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Aswanto alias Wanto di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 54. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Deni Askar alias Erik di Perairan Pulau Jodoh pada tanggal 4 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 55. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dandi Bin Burahin di Perairan Kota Palopo pada tanggal 07 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 56. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Arif Bin Abunawas di Perairan Kota Palopo pada tanggal 07 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 57. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rafli Bin Rudi di Perairan Kota Palopo pada tanggal 07 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 58. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dewi Bin Japata alias Papa Veni di Perairan Morowali pada tanggal 26 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. Selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut.
 59. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bobi Bin Jumani di Perairan Morowali pada tanggal 26 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan kapal tersebut Tanpa dokumen dan melakukan aktifitas penangkapan Ikan dengan cara merusak. selanjutnya Kapal diproses untuk penyidikan lebih lanjut

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2022 sebesar Rp185.121.000 dan realisasi sampai dengan TW III tahun 2022 adalah Rp69.104.448, dan persentase realisasi anggaran adalah 37,33%.

Sasaran Kegiatan 2.1:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Capaian Sasaran Kegiatan 2.1 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 2 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, target capaian IKU pada TW III tahun 2022 adalah 100% dengan capaian kinerja TW III tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian TW III tahun 2021 capaian nya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.712.392.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp 437.916.476 realisasi anggaran adalah 25,57%..

IKU2 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan tahun 2022 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat pemberitahuan ke pelaku usaha, surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan yang diinput ke sistem pelaporan Direktorat PPSDP.

1. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap produk perikanan yang akan diolah telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan baik nasional maupun internasional. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan sesuai dengan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bidang Perikanan.

Target pemeriksaan UPI tahun 2022 adalah 107 Unit pengolahan ikan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dengan tingkat persentase penyelesaian pemeriksaan unit pengolahan ikan 100%. Sampai dengan TW III tahun 2022 telah dilaksanakan pengawasan UPI terhadap 40 (empat puluh) UPI dengan presentase penyelesaian pemeriksaan 100%. hasil kegiatan sebagai berikut:

1. PT. CARVINNA TRIJAYA MAKMUR dengan kode KBLI 10221 - - Industri

Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng yang beralamat di Jl. Arnoldus Sompotan, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara.

2. PT. Anping Seafood Indonesia dengan kode KBLI.10213 - Industri Pembekuan Ikan.yang beralamat di Lingkungan IV, Jl. Manembo-nembo bawah, Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
3. PT. Marina Nusantara Selaras dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Tanjung Merah, Kel. Manembo nembo, Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
4. PT. Bintang Mandiri Bersaudara dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Tandurusa Pantai Kecil, Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung Sulawesi Utara.
5. PT. Prima Bahari Inti Lestari dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Kima 12 Kav. 5C, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
6. PT. Celebes Minapratama dengan kode KBLI 10212 - Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan 1, Kota Bitung Sulawesi Utara.
7. PT. PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan, 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya, 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng yang beralamat di Jl. Lamelleng No.42 Desa Bojo Baru, Kec.Mallusetasi Kab.Barru. Sulawesi Selatan 90753 Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab/Kota. Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan Kel. Bojo Baru Kec. Mallusetasi Kab/Kota. Kab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan.
8. PT. KENNDI FISHERIES INDONESIA dengan kode KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya yang beralamat di Jl. Tol Lama No. 3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Desa/Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90241 Sulawesi Selatan
9. PT. KENNDI FISHERIES INDONESIA dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Tol Lama No. 3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Desa/Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90241 Sulawesi Selatan
10. PT. RD PACIFIC INTERNATIONAL dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Raya Madidir, Kel. Paceda, Kec.

Madidir, Kota Bitung Sulawesi Utara

11. PT. SAMUDRA MANDIRI SENTOSA dengan kode KBLI 10221- Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi KM. 5 Wangurer, Kota Bitung Sulawesi Utara.
12. PT. Brilliant Ocean Fish dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Lingkungan II, RT 4, Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara.
13. PT. Deho Canning Company dengan kode KBLI 10219 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan yang beralamat di Jl. Raya Madidir-Bitung, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara.
14. PT. Dunia Marine Products dengan kode KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya yang beralamat di Jl. Kima 3 Kav. 4B Makassar Sulawesi Selatan.
15. PT. Mitra Kartika Sejati dengan kode KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya yang beralamat di Jl. Kima Raya I Kav. D-1B, Daya, Biringkanaya, Makassar Sulawesi Selatan.
16. PT. Yin Jing Internasional dengan kode KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya yang beralamat di Jl. Kima 3, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
17. PT. Keumkang Industri Indonesia dengan kode KBLI 10293 - Industri Pembekuan Biota Air lainnya yang beralamat di Jl. Kima 15 Kav. R4D-R4E, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
18. PT. Barumbun Jaya dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Kompleks PPS Bitung Sulawesi Utara
19. PT. Pacific Green Algae dengan kode KBLI 10298 - Industri Pengolahan Rumput Laut yang beralamat di Jln. Kapasa Raya No. 29 B, Bira, Tamalanrea, Makassar Sulawesi Selatan.
20. PT. Kelola Mina Laut dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Kompleks PPS Kendari, Jl. Samudera No 1 Kel. Puday, Kec. Abeli, Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
21. PT. Chen Woo Fishery dengan kode KBLI 10299 - Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya yang beralamat di Jl. Kima 4 Kav. K-9 Blok B2, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
22. PT. Dharma Samudera Fishing Industries dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 39 Kota Kendari

Sulawesi Tenggara.

23. PT. Laut Biru Seafood dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV, RT 001/ RW. 004, Kelurahan Girian bawah Sulawesi Utara.
24. PT. Sinar Pure Foods International dengan kode KBLI 10221 - - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng yang beralamat di Jl. Raya Madidir Kel. Paceda. Kec. Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara.
25. PT. Asnur Anton Jaya dengan kode KBLI 10298 - Industri Pengolahan Rumput Laut yang beralamat di Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea Sulawesi Selatan.
26. PT. CHEN WOO FISHERY dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara.
27. PT. Sultratuna Samudra dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Samudera No. 1 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Kel. Puday Kec. Abeli Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
28. CV 99 dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah.
29. PT. Sinar Malalugis Makmur dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah
30. PT. Laut Jaya Sentosa dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Desa Gonggong, Kec. Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah
31. CV. Benggawi Sukses Selalu dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Desa Gonggong, Kec. Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah.
32. CV. Indotropic Fishery dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Raya KM. 9, Kelurahan Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.
33. PT. Inti Jaya Bahari dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi KM. 10 Kahobotik, Dusun II Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.
34. PT. Kaya Samudra Global dengan kode KBLI 10298 - Industri Pengolahan

- Rumput Laut yang beralamat di Jl. Ir. Sutami Kompleks Pelitagro B 6 , Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea Sulawesi Selatan.
35. PT. Cilacap Samudra Fishing Industry dengan kode KBLI 03133 - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di laut yang beralamat di Jl. Samudera No. 1, Kelurahan Pudah, Kecamatan Abeli Sulawesi Tenggara.
 36. PT. Cenhong Fisherindo dengan kode KBLI 10213 - Industri Pembekuan Ikan yang beralamat di Jl. Mesjid Annur RT. 001, RW. 001, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Sulawesi Utara.
 37. PT. Flying Fish Algae dengan kode KBLI 10298 - Industri Pengolahan Rumput Laut yang beralamat di Jl. Ir. Sutami No 19, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
 38. CV. Ken Jaya Perkasa dengan kode KBLI 03133 - Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di laut yang beralamat di Kauditan II, Kauditan, Minahasa Utara Sulawesi Utara.
 39. PT. Manadomina Citrataruna dengan kode KBLI 10212-Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan 1, Kota Bitung Sulawesi Utara.
 40. PT. CDF Indonesia dengan kode KBLI 10212 - Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan yang beralamat di Desa Kauditan I Jaga IV, Kec. Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 349.992.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp 21.250.000 persentase realisasi anggaran adalah 6,07%.

2. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan pengangkutan dan pemasaran ikan sesuai dengan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko bidang Perikanan.

Sampai dengan TW III 2022 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 20 pelaku usaha subsektor pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Celebes Minapratama dengan kode KBLI 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan yang beralamat di Lingkungan II, Wangurer, Madidir Sulawesi Utara
2. Muhammad Hisyam Hasyim dengan kode KBLI 50133 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus yang beralamat di Jl. Padjonga Dg. Ngalle 2 No.

- 41 C 002/002 Mamajang Kota Makassar Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
3. KENJI KUZUNUKI dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Tol Lama No. 3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Desa/Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
 4. KENJI KUZUNUKI dengan kode KBLI 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan yang beralamat di Jl. Tol Lama No. 3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Desa/Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
 5. PT. Sinar Pure Foods International dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Raya Madidir Kel. Paceda. Kec. Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara.
 6. LU XIN dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Ir. Sutami. Komplek Pelitagro B.6, Desa/Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90245
 7. DONG KUANGBA dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di JALAN IR SUTAMI NOMOR 1 9, Desa/Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
 8. PT. Dwira Masagena dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Kima Raya 1 Kav. B 5 Kota Makassar Sulawesi Selatan.
 9. CV. Mutiara Bantaeng dengan kode KBLI 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan yang beralamat di Dusun Gallea, RT. 001, RW.002, Biangkeke, Pajukukang, Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan.
 10. PT. Deho Canning Company dengan kode KBLI 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan yang beralamat di Jl. Raya Madidir-Bitung, Kel. Paceda, Kec. Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara
 11. CV. CAMAR LAUT dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Raja Wadipalapa No 18, Desa Dulomo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Sulawesi Utara.
 12. PT. Dunia Marine Products dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Kima 3 Kav. 4B Makassar Sulawesi Selatan.
 13. PT. Mitra Kartika Sejati dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Kima Raya I Kav. D-1B, Daya, Biringkanaya,

Makassar Sulawesi Selatan.

14. PT. Indo Jaya Fortunadengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Tanjung Merah, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
15. PT. Samudra Mandiri Sentosa dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi KM. 5 Wangurer, Kota Bitung, Provinsi. Sulawesi Utara.
16. PT. Asnur Anton Jaya dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea Sulawesi Selatan.
17. PT. Phillips Seafoods Indonesia dengan kode KBLI 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan yang beralamat di Jl. Lamelleng No. 42, Desa Bojo Baru, Kec. Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
18. PT. Kelola Mina Laut dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Kompleks PPS Kendari, Jl. Samudera No 1 Kel. Puday, Kec. Abeli, Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
19. PT. Dharma Samudera Fishing Industri dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 39 Kota Kendari Sulawesi Tenggara.
20. CV. Ken Jaya Perkasa dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Kauditan II, Kauditan, Minahasa Utara Sulawesi Utara.
21. CV. Golden KK dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Baru Tugu Adipura Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado Sulawesi Utara.
22. PT. CHEN WOO FISHERY dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Worang By Pass, Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara.
23. PT. Tirta Bitung Bahari dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Kompleks PPS Bitung Sulawesi Utara.
24. PT. Keumkang Industri Indonesia dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Kima 15 Kav. R4D-R4E, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.
25. PT. Yin Jing Internasional dengan kode KBLI 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan yang beralamat di Jl. Kima 3, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

26. PT. Prima Bahari Inti Lestari dengan kode KBLI 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan yang beralamat di Jl. Kima 12 Kav. 5C, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 167.450.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp 10.040.000 persentase realisasi anggaran adalah 5,99%.

3. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan

Pengawasan Subsektor penangkapan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Bersuaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor penangkapan ikan dilakukan :

- 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut;
- 03112 - Penangkapan Crustacea di Laut;
- 03113 - Penangkapan Mollusca di Laut;
- 03115 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut;
- 03116 - Penangkapan Echinodermata di Laut;
- 03117 - Penangkapan Coelenterata di Laut;
- 03118 - Penangkapan Ikan Hias Laut;
- 03119 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut;
- 03121 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat;
- 03122 - Penangkapan Crustacea di Perairan Darat;
- 03123 - Penangkapan Mollusca di Perairan Darat;
- 03124 - Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat;
- 03125 - Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat;
- 03126 - Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat; dan
- 03127 - Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat.

Kategori penyelesaian pemeriksaan KBLI penangkapan ikan sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Kerja/atasan bagi Pengawas Perikanan dilengkapi seragam dinas Pengawas Perikanan dengan atribut yang lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam Pengawas Perikanan;
- b. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha;
- c. Pemeriksaan teknis sesuai Perdirjen 6 Tahun 2021 meliputi:
 - 1) Pemenuhan persyaratan umum usaha
 - 2) Pemenuhan persyaratan khusus usaha

- 3) Pemenuhan sarana
 - 4) Kesesuaian struktur organisasi dan SDM
 - 5) Pemenuhan pelayanan
 - 6) Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa
 - 7) Pemenuhan sistem manajemen usaha
- d. Melakukan dokumentasi hasil pengawasan perikanan melalui sistem pelaporan Dit. PPSDP.

Sampai dengan TW III tahun 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap delapan pelaku usaha dengan Kode KBLI 03111 – Penangkapan Pisces/ikan Bersirip di Laut.

Pelaksanaan pemeriksaan meliputi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha, meliputi 1 Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan, 2 Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, 3 Surat Ukur Kapal Perikanan, 4 Buku Kapal Perikanan, 5 Persetujuan Berlayar, 6 Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, 7 Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan dan 8 Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

Memenuhi pemenuhan kewajiban NSPK, meliputi 1 Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nahkoda, 2 mempekerjakan awak kapal perikanan dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut PKL dan 3 memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan, Sertifikat AhliNautika Kapal Perikanan ANKAPIN , Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan ATKAPIN , Sertifikat BST-F, Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan, Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan, Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan, melaporkan ikan hasil tangkapan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada pelabuhan pangkalan, mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Hasil penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Subsektor Penangkapan Ikan adalah 100%.

Rincian hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Rahmat diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 912041132832 yang beralamat di Jl. H. Andi Dai, Desa/ Kelurahan Binanga, Kec. Mamuju, Kota Mamuju, Sulawesi Barat dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Mikro dan Kecil.
2. Pada tanggal 26 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha

Sudahnun diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 810210004698 yang beralamat di Jl. 21 Januari, Desa/ Kelurahan Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.

3. Pada tanggal 28 Maret 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Samudera Arta Mina, PT diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 1212000222231 yang beralamat di Lingkungan IV, RT.016/RW.004, Kel. Pateten Satu, Kec. Aertembaga, Kota Bitung Sulawesi Utara dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.
4. Pada tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Andi Baligau diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 1403220064954 yang beralamat di Daloba, Desa/ Kelurahan Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.
5. Pada tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha H. Bahrnun diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 2312210026624 yang beralamat di Link. Kassi, RT.001/RW.001, Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.
6. Pada tanggal 18 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha H. Abdullah diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 2211210008315 yang beralamat di Link. Kassi, RT.0/RW.0, Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar
7. Pada tanggal 19 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha H. Baharuddin S. diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 1005220019149 yang beralamat di Link. Kassi, RT.001/RW.001, Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.
8. Pada tanggal 19 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha

Dinamariama diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 1266000702473 yang beralamat di Daloba, Desa/ Kelurahan Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.

9. Pada tanggal 25 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Kamaruddin diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 1403220062434 yang beralamat di Pelabuhan, RT.02/RW.02, Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.
10. Pada tanggal 25 Juli 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha Muh Hatta diketahui telah memiliki NIB dengan Nomor 1304220020086 yang beralamat di Kassi, Kel. Tanah Jaya, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN dengan kode KBLI 03111 - Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut dengan kategori skala usaha Menengah dan Besar.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 685.400.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp. 363.325.510 realisasi anggaran sebesar 53,09%.

4. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pembudidayaan Ikan

Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan;

Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada subsektor pembudidayaan ikan dilakukan terhadap:

- 03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut;
- 03215 - Pembesaran Mollusca Laut;
- 03216 - Pembesaran Crustacea Laut;
- 03217 - Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
- 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;
- 03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
- 03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba;

- 03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
- 03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
- 03251 - Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;
- 03253 - Pembesaran Mollusca Air Payau;
- 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau;
- 03255 - Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
- 03212 - Pembenihan Ikan Laut;
- 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar;
- 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau;
- 03213 - Budidaya Ikan Hias Air Laut;
- 03214 - Budidaya Karang Coral ;
- 03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
- 03225 - Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
- 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
- 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
- 03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;
- 03232 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;
- 03241 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
- 03242 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;
- 03261 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;
- 03262 - Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau.
- 03233 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;
- 03243 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;
- 03263 - Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau.

Sampai dengan TW III tahun 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap 19 pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan. Dengan capaian penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan adalah 100%. rincian kegiatan sebagai berikut:

1. PT. ARTA SAMUDERA memiliki nomor induk berusaha 9120108602219 yang beralamat di Jl, Tandursa - Aertembaga Kec. Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara dengan status penanaman modal PMA jenis usaha yang dijalankan 03215 - Pembesaran Mollusca Laut.
2. PT. SONOK LESTARI MAS memiliki nomor induk berusaha 9120001282619 yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno No. 60, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara dengan status penanaman modal PMA jenis usaha yang dijalankan 03211 - Pembesaran ikan/pisces bersirip di laut.
3. CV. DEWI WINDU memiliki nomor induk berusaha 9120400471207 yang beralamat di Jalan Poros Makassar Parepare Km. 98, Kelurahan Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau.
4. PT. ESAPUTLII PRAKASA UTAMA memiliki nomor induk berusaha 8120219232209 yang beralamat di Jl. H. A. Mappanyukki No. 9, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau.
5. PT. SINAR BARRU PRIMA memiliki nomor induk berusaha 8120012210699 yang beralamat di Jalan Poros Parepare Makassar Lingkungan Jalange, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03252 - Pembenihan Ikan Air Payau
6. POKDAKAN SALEKO MAMMESA memiliki nomor induk berusaha 1249000201499 yang beralamat di Kelurahan Batetangnga, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam.
7. PT. MANAKARA SAKTI ABADI memiliki nomor induk berusaha 9120207531279 yang beralamat di Dusun Urubanua, Kelurahan Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03216 - Pembesaran Crustacea Laut.
8. PT. SEJAHTERA TANI TAMBAK SARJO memiliki nomor induk berusaha 2910210026573 yang beralamat di Dusun Balabonda, Kelurahan Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau.
9. PT. RANDOMAYANG TAMBAK LESTARI memiliki nomor induk berusaha 9120103561073 yang beralamat di Desa Randomayang, Kecamatan

- Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau.
10. PT. SINAR SUKSES PERSADA memiliki nomor induk berusaha 9120106672013 yang beralamat di Perbatasan Kelurahan Bulu Bulu Dan Kelurahan Palajau, Kelurahan Bulu Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03216 - Pembesaran Crustacea Laut.
 11. PT. DUA LIMA SATU DUA memiliki nomor induk berusaha 0220608980422 yang beralamat di Lingkungan Panyutana, Kelurahan Mario Rennu, Kecamatan Gantorang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03219 - Budidaya Biota Air Laut Lainnya.
 12. CV. GLORI JAYA SAKTI memiliki nomor induk berusaha 9120100822237 yang beralamat di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03216 - Pembesaran Crustacea Laut.
 13. PT. AGRO NUSANTARA HALID memiliki nomor induk berusaha 1711210014937 yang beralamat di Kampung Baru, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau.
 14. CV. ARUNG BONTO BAHARI memiliki nomor induk berusaha 9120302830492 yang beralamat di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau.
 15. Horiguchi Sinar Insani, PT memiliki nomor induk berusaha 9120103372569 yang beralamat di Jaga Iii Desa Talise Kecamatan Likupang Barat dengan status penanaman modal PMA jenis usaha yang dijalankan 03215 - Pembesaran Mollusca Laut.
 16. PT. TUMPAAN MAKURI MANDIRI memiliki nomor induk berusaha 0220109840861 yang beralamat di Paslaten Satu, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau.
 17. RAHMAWATI MANSUR memiliki nomor induk berusaha 2310210001925 yang beralamat di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03259 - Budidaya Biota Air Payau Lainnya

18. PT. ARONA TELUK TOMINI memiliki nomor induk berusaha 8120015151552 yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Petak, Kecamatan Nuhon dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03216 - Pembesaran Crustacea Laut.

19. WIJOYO MANTANG memiliki nomor induk berusaha 1210210007775 yang beralamat di Desa Iyok, Kecamatan Bolangitang Barat dengan status penanaman modal PMDN jenis usaha yang dijalankan 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau.

Penyelesaian pemeriksaan terhadap pelaku usaha subsektor pembudidayaan ikan tercapai 100% dengan pemenuhan seluruh unsur pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 496.000.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp. 43.300.966, realisasi anggaran sebesar 8,73%.

Sasaran Kegiatan 3.1:

Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Sasaran Kegiatan 3.1 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif didukung oleh IKU Persentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Didukung dengan 1 IKU yaitu Presentase Pokmaswas yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

IKU3 PERSENTASE POKMASWAS YANG AKTIF MENDUKUNG PENGAWASAN SDKP LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 belum dilakukan Pengukuran terhadap IKU ini dan pengukurannya dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 378.225.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp.0,-

Sasaran Kegiatan 3.2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

IKU Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif terdiri dari dua indikator kinerja, yaitu: 1 IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2 IKU Indeks Operasi Speed Boat Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 7.116.485.000 dan realisasi TW III tahun 2022 Rp 5.448.308.949, persentase realisasi anggaran sebesar 76,56%.

IKU4 INDEKS KINERJA KAPAL PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III belum dilakukan Pengukuran terhadap IKU ini dan pengukurannya dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.

IKU5 INDEKS KINERJA SPEED BOAT PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III belum dilakukan Pengukuran terhadap IKU ini dan pengukurannya dilakukan pada Triwulan IV tahun 2022.

IKU6 INDEKS PEMENUHAN LOGISTIK ARMADA PENGAWASAN SDKP

Capaian kinerja IKU Indeks Kinerja Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sampai dengan TW III tahun 2022 100 dari target 90 dengan presentasi capaian kinerja 111,11%.

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel

- a. Logistik kapal terdiri dari :
 1. Bahan Bakar Minyak BBM , dan
 2. Pelumas
- b. Logistik Personel terdiri dari
 1. Bahan Makanan
 2. Air Tawar, dan
 3. Alat-alat Pelayanan ATK, Bahan Komputer, Komaliwan, Peta dan atau Buku Jurnal Deck & Mesin

Daftar Faktor Penghitung Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP

- a) Bahan Bakar Minyak BBM 30% ;
- b) Pelumas 20% ;
- c) Bahan Makanan 30% ;
- d) Air Tawar 15% ;
- e) Alat-alat Pelayanan 5%

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 telah dilaksanakan operasi Kapal pengawas beserta pemenuhan logistiknya sehingga pada TW III 2022 target capaian IKU tercapai 100% dengan capaian kinerja 111,11% .

Sasaran Kegiatan 3.3 :
Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Capaian Sasaraan Kegiatan 3.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP di dukung dengan 2 dua indikator kinerja, yaitu: 1 . IKU Presentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW III 2022 anggaran untuk mendukung IKU ini terkena *Automatic Adjustment* sehingga tidak dapat dilaksanakan. 2 . IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Pada tahun 2022 di Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 17 unit armada pengawasan yang dirawat yaitu 2 unit Kapal Pengawas, 7 unit Speed Boat, 1 unit Rigid Inflatable Boat dan 7 unit Rubber Boat.

**IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Sampai dengan TW III 2022 anggaran untuk mendukung IKU ini terkena *Automatic Adjustment* sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

**IKU8 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN
LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG**

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

Sasaran Kegiatan 4.1:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 4.1 SK-4.1 Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan didukung oleh 5 IKU yaitu 1 . IKU Persentase efektifitas penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 2 IKU Presentase efektifitas penyelesaian penanganan barang bukti lingkup pangkalan PSDKP Bitung; 3 IKU Presentase efektifitas penyelesaian penanganan awak kapal lingkup pangkalan PSDKP Bitung; 4 . IKU Presentase efektifitas penyelesaian penanganan sanksi administratif lingkup pangkalan PSDKP Bitung 5 . IKU Persentase efektifitas koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 1.006.424.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp 219.235.130 realisasi anggaran sebesar 21,78%. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada TW III dengan penanganan 10 perkara TPKP dan untuk realisasi anggarannya masuk di TW IV 2022.

IKU9 PERSENTASE EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III tahun 2022 target perkara yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Bitung adalah 10 perkara dan telah terealisasi sampai dengan TW III adalah 10 perkara dengan jenis kasus *Destructive Fishing*. Semua perkara yang ditangani Pangkalan PSDKP Bitung di TW III telah selesai sampai dengan Tahap 2. Sehingga Target capaian pada TW III 2022 adalah 75 dan tercapai 100% sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 120%.

Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan III tahun 2022 semuanya merupakan kasus *Destructive Fishing* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Penanganan TPKP sampai dengan TW III 2022

NO	NAMA KAPAL	NAMA TERSANGKA	LOKASI PENANGANAN	TAHAP II	TANGGAL TAHAP II
1	KM. DUA H 01	RAHMAN ALIAS LA ADE	Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan	1381/PSDKPLan.5/PW.510/VII/2022	28 Juli 2022
2	KM. DUA H 01	KADIR NASIR BIN NASIR	Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan	1382/PSDKPLan.5/PW.510/VII/2022	28 Juli 2022
3	KM. DUA H 01	RUSDIN BIN HAMIR PILOK	Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan	1383/PSDKPLan.5/PW.510/VII/2022	28 Juli 2022
		ASWANTO ALIAS WANTO			
		DENI ASKAR ALIAS ERIK			
4	KM. DUA H 01	NUAR ANWAR ALIAS NUAR	Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan	1384/PSDKPLan.5/PW.510/VII/2022	28 Juli 2022
		RASMAN ALIAS ATO			
		LARINO ALIAS RINO			
		SUDARLIN RATMAN ABBAS ALIAS ATU			
5	KM. DUA H 01	JODI ALIAS ODI	Wilker PSDKP Banggai Laut dan Kepulauan	1385PSDKPLan.5/PW.510/VII/2022	28 Juli 2022
		RAHUL BIN ALWI			
		PAJRI BIN HUSRIN			
6	PERAHU TANPA NAMA	DANDI BIN BURAHIN	Wilker PSDKP Palopo	1424/PSDKPLan.5/PW.510/VIII/2022	3 Agustus 2022
7	PERAHU TANPA NAMA	ARIF BIN ABUNAWAS	Wilker PSDKP Palopo	1425/PSDKPLan.5/PW.510/VIII/2022	3 Agustus 2022
8	PERAHU TANPA NAMA	RAFLI BIN RUDI	Wilker PSDKP Palopo	1426/PSDKPLan.5/PW.510/VIII/2022	3 Agustus 2022
9	Perahu motor KM. NELAYAN 793	DEWI BIN JAPATA	Wilker PSDKP Morowali	1504/PSDKPLan.5/PW.520/VIII/2022	16 Agustus 2022
10	Perahu motor KM. NELAYAN 793	BOBI BIN JUMANI ABUNAWAS	Wilker PSDKP Morowali	1505/PSDKPLan.5/PW.520/VIII/2022	16 Agustus 2022

IKU10 PRESENTASE EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PENANGANAN BARANG BUKTI LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan TW III tahun 2022 telah dilakukan penanganan terhadap barang bukti TPKP sebanyak 3 unit kapal/perahu dari 10 perkara yang ditangani di Pangkalan PSDKP Bitung. Target capaian pada TW III 2022 adalah 75 dan tercapai 100% dengan capaian kinerja 120%. Berikut adalah rincian penanganan terhadap barang bukti yang ditangani di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan TW III 2022:

Tabel 6. Daftar Penanganan Barang Bukti TPKP sampai dengan TW III 2022

NO.	FOTO BARANG BUKTI	NAMA BARANG BUKTI			DITANGKAP OLEH	NAMA TERSANGKA	PROSES HUKUM	KET.
		KAPAL						
		NAMA	GT	BENDERA				
1		Perahu Motor Tanpa Nama	1	Indonesia	Laporan Masyarakat kepada Wilker PSDKP Bangkeplut	Laipo	INKRACH T	Di kembalikan ke pemilik
2		KM. DUA H 01	9	Indonesia	Tim Patroli Speed Boat DOLPHIN 003, Wilker PSDKP Bangkeplut	Rahman, dkk	INKRACH T	Di kembalikan ke pemilik
3		Perahu Motor KM. NELAYAN 793	1	Indonesia	Tim Pengawasan SDKP Kab. Morowali (Laporan Masyarakat kepada Wilker PSDKP Morowali)	Dewi, dkk	INKRACH T	Dikembalikan kepada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali

IKU11 PRESENTASE EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PENANGANAN AWAK KAPAL LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan TW III tahun 2022 telah dilakukan penanganan terhadap Awak Kapal pelaku TPKP sebanyak 21 orang WNI dari 10 perkara yang ditangani di Pangkalan PSDKP Bitung. Target capaian pada TW III 2022 adalah 75 dan tercapai 100% dengan capaian kinerja 120%. Berikut adalah rincian penanganan terhadap Awak Kapal yang ditangani di Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan

Table 7. Daftar Penanganan ABK TPKP sampai dengan TW III 2022

No	NAMA KAPAL	NAMA LENGKAP	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KEWARGA NEGARAAN	NIK	KET.	
1	KM. DUA H 01	1	Rahman	25 Mei 1980	Laki-Laki	Indonesia	7207012505800001	Tahap II
		2	Rusdin	29 Juli 1986	Laki-Laki	Indonesia	7207010907860002	Tahap II
		3	Deni Askar	4 Juli 1986	Laki-Laki	Indonesia	7207020707890002	Tahap II
		4	Aswanto	03 Oktober 1993	Laki-Laki	Indonesia	7207080310940002	Tahap II
		5	Kadir Nasir	1 Juli 1976	Laki-Laki	Indonesia	7207150107760019	Tahap II
		6	Rahul	23 Maret 2001	Laki-Laki	Indonesia	7207080211040002	Tahap II
		7	Jodi	12 Oktober 2002	Laki-Laki	Indonesia	7207080107030007	Tahap II
		8	Larino	1 Juli 1988	Laki-Laki	Indonesia	7207080107880015	Tahap II
		9	Sudarin R. Abbas	7 Mei 1983	Laki-Laki	Indonesia	7207131210830001	Tahap II
		10	Dimas	11 Juni 2006	Laki-Laki	Indonesia	7207061707040002	Tahap II
		11	Nuar Anwar	07 September 1980	Laki-Laki	Indonesia	7207080709800002	Tahap II
		12	Panji	10 Desember 2006	Laki-Laki	Indonesia	7206061012060001	Tahap II
		13	Pajri	24 Mei 2002	Laki-Laki	Indonesia	7207102405020001	DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA
		14	Rasman	17 Januari 1994	Laki-Laki	Indonesia	7207080107940005	DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA
2	PERAHU MOTOR KM NELAYAN 793	15	DEWI Bin JAPATA Alias PAPA VENI	20 Juni 1985	Laki-Laki	Indonesia	7206066006850002	Tahap II
		16	BOBI Bin JUMANI	04 Juli 1996	Laki-Laki	Indonesia	7206060401960002	Tahap II
		17	ZULKIFLIN Bin IDRUS L.B.	25 Januari 2005	Laki-Laki	Indonesia	7206081501050003	DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA
3	KM. TANPA NAMA	18	Dandi	26 Desember 2000	Laki-Laki	Indonesia	7317073112990005	Tahap II
		19	Arif	04 September 1999	Laki-Laki	Indonesia	7317030107960013	Tahap II
		20	Raffi	26 April 2004	Laki-Laki	Indonesia	7317076604040001	Tahap II
		21	Rendi	09 Desember 2009	Laki-Laki	Indonesia	7317070912090002	DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA

IKU12 PRESENTASE EFEKTIFITAS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan TW III 2022 perkara yang ditangani oleh pangkalan PSDKP Bitung adalah 15 perkara yang di kenakan sanksi administrasi. Pada TW III 2022 belum ada target yang ditetapkan namun realisasinya tercapai 100% karena sampai dengan TW III telah dilakukan pengenaan sanksi administrative terhadap 15 pelaku usaha perikanan dengan rincian 10 pelaku usaha subsektor penangkapan ikan bersirip di laut dan 5 pelaku usaha subsektor pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan. berikut adalah rincian pengenaan sanksi adminsitrasi yang ditangani oleh Pangkalan PSDKP Bitung :

1. BUDI HARAPAN – 09 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 30 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai Laut jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
2. KM. ZAHRA 110 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 24 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
3. KM. SAKHI JAYA jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 18 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
4. KM. FOR TUNA 53 02 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 14 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
5. KM. WAHYU NUR 01 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 23 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
6. KM. BINTANG ARIES jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 14 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
7. KM. SINAR MANDAR jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 26 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
8. KM. INKA MINA 947 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 30 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
9. KM. CAHAYA LAPEO jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 6 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
10. KM. FADIL JAYA 725 jenis alat tangkap PURSE SEINE GT 13 Bendera Kapal Indonesia lokasi penanganan di Wilker PSDKP Banggai jenis saksi yang diberikan SANKSI ADMINSTRASI
11. PT. Pacific Green Algae NIB 3101220043485 Pemilik/penanggung jawab Cai Waimiao status modal PMA skala usaha Besar jenis pelanggaran Tidak memiliki SKP tindakan hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi
12. PT. Laut Jaya Sentosa NIB 9120316080573 Pemilik/penanggung jawab ARYADI JOKO PRASETYO status modal PMDN skala usaha Menengah jenis pelanggaran Tidak memiliki IPAL tindakan hukum yang dikenakan

berupa sanksi administrasi.

13. CV. 99 NIB 8120016200489 Pemilik/penanggung jawab FERIAN TO TANNUS status modal PMDN skala usaha Menengah jenis pelanggaran Tidak memiliki IPAL tindakan hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi.
14. PT. Sinar Malalugis Makmur NIB 8120005871564 Pemilik/penanggung jawab HENDY status modal PMDN skala usaha Menengah jenis pelanggaran Tidak memiliki IPAL tindakan hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi
15. CV. CAMAR LAUT NIB 9120106312428 Pemilik/penanggung jawab IDRIS NTSEO status modal PMDN skala usaha Menengah jenis pelanggaran Tidak memiliki Persetujuan Lingkungan tindakan hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp278.980.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp 30.262.307 persentase realisasi anggaran sebesar 10,85%.

IKU13 PRESENTASE EFEKTIFITAS KOORDINASI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sampai dengan TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukurannya pada TW IV 2022.

Sasaran Kegiatan 5.1:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Capaian Sasaran Kegiatan 5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP di dukung dengan 13 tiga belas indikator kinerja. Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 20.506.151.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp. 14.423.789.395 persentase realisasi anggaran sebesar 70,34%.

IKU14 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Kepuasan Masyarakat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pengawas perikanan dengan membandingkan

antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap Triwulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Trwulan III tahun 2022 indikator kinerja ini Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO adalah 90,55 dari target 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan SLO pada TW III 2022 adalah 113,19%. Jika dibandingkan dengan capaian IKM pada Triwulan III tahun 2021 senilai 84,95 mengalami kenaikan senilai 5,6 poin, hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan SLO. Perbaikan standar dan peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan dengan melaksanakan forum konsultasi pelayanan publik yang dihadiri oleh para pengguna jasa dan stake holder yang telah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022.

Tabel 8. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan SLO TW III tahun 2022

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,573	sangat baik	0,397	89,333
U2	Prosedur	3,547	sangat baik	0,394	90,333
U3	Waktu Pelayanan	3,480	sangat baik	0,386	87,000
U4	Biaya/Tarif	3,730	sangat baik	0,414	100,000
U5	Produk Layanan	3,459	sangat baik	0,384	86,486
U6	Kompetensi Pelaksana	3,587	sangat baik	0,398	89,333
U7	Perilaku Pelaksana	3,600	sangat baik	0,400	90,000
U8	Sarana dan Prasarana	3,707	sangat baik	0,411	86,667
U9	Pengaduan Masyarakat	3,947	sangat baik	0,438	98,667
Rata - Rata Semua Unsur				3,622	

Keterangan :	
- U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKR	= Indeks Kepuasan Responden
- *)	= Jumlah NRR IKR tertimbang
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,111
IKR TERHADAP RSS : 90,55	
Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Memuaskan)	: 81,26 - 100,00
B (Memuaskan)	: 62,51 - 81,25
C (Kurang Memuaskan)	: 43,76 - 62,50
D (Tidak Memuaskan)	: 25,00 - 43,75

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 75 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat SKM : 3,622 dengan angka Indeks sebesar 90,55 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 21.200.000,- dan realisasi anggaran TW III tahun 2022 adalah Rp.15.850.00 persentase realisasi anggaran adalah 74,76 %.

IKU15 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW III tahun 2022 adalah 90,94 dari target 80, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan LVHPI adalah 113,68%. Jika dibandingkan dengan nilai IKM pada TW III tahun 2021 yaitu 84,95 menunjukkan adanya peningkatan 5,99 poin. hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan LVHPI.

Tabel 9. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna layanan LVHPI TW III tahun 2022

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3,508	sangat baik	0,389	87,698
U2	Prosedur	3,532	sangat baik	0,392	88,492
U3	Waktu Pelayanan	3,524	sangat baik	0,391	88,095
U4	Biaya/Tarif	3,770	sangat baik	0,418	100,000
U5	Produk Layanan	3,540	sangat baik	0,393	88,492
U6	Kompetensi Pelaksana	3,619	sangat baik	0,402	89,286
U7	Perilaku Pelaksana	3,667	sangat baik	0,407	91,667
U8	Sarana dan Prasarana	3,659	sangat baik	0,406	84,127
U9	Pengaduan Masyarakat	3,952	sangat baik	0,439	98,810
Rata - Rata Semua Unsur				3,637	

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKR = Indeks Kepuasan Responden
- *) = Jumlah NRR IKR tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

IKR TERHADAP RSS : 90,94

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Memuaskan) : 81,26 - 100,00**
- B (Memuaskan) : 62,51 - 81,25**
- C (Kurang Memuaskan) : 43,76 - 62,50**
- D (Tidak Memuaskan) : 25,00 - 43,75**

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan LVHPI di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 94 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat SKM : 3,637 dengan nilai Indeks sebesar 90,94 dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam interval nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 21.200.000,- dan realisasi anggaran TW III tahun 2022 adalah Rp.15.850.00 persentase realisasi anggaran adalah 74,76 %.

IKU16 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU17 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU18 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU19 NILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU20 UNIT YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU21 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU22 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU23 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Hasil capaian IKU ini pada TW III tahun 2022 adalah 100% dari target 2022 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 86%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini adalah 116,28%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW III 2021 yaitu 100 nilai ini tidak mengalami perubahan, namun ada kenaikan target yang semula 84 menjadi 86.

Alokasi anggaran tahun 2022 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 8.705.000 dan realisasi TW III tahun 2022 adalah Rp. 6.180.400 atau 70,99%.

IKU24 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN IKPA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

IKU25 NILAI KINERJA ANGGARAN NKA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada TW III 2022 Belum dilakukan pengukuran capaian terhadap IKU ini, dan akan dilakukan pengukuran capaiannya pada TW IV 2022.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2022 adalah Rp. 42.735.383.000 realisasi anggaran TW III tahun 2022 adalah Rp 28.604.447.128 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 66,93%.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Per Kegiatan sampai dengan TW III Tahun 2022

NO	Kode Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Realisasi	%
1	2350 Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	18.780.748.000	13.250.555.943	70,55
2	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.006.424.000	219.235.130	21,78
3	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	729.668.000	243.376.436	33,35
4	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.712.392.000	467.490.224	27,30
5	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.506.151.000	14.423.789.395	70,34
	TOTAL	42.735.383.000	28.604.447.128	66,93

Dari data realisasi di atas, Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tertinggi ada pada kegiatan Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan 2350 dengan persentase penyerapan 70,55% dan realisasi anggaran terendah pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan 2351 dengan persentase penyerapan 21,78%. Rendahnya realisasi anggaran kegiatan tersebut disebabkan karena di pangkalan PSDKP Bitung penanganan TPKP dilaksanakan di TW III dan sebagian besar realisasi anggarannya diusulkan di TW IV 2022.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP sebagai pemberi amanah dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung sebagai penerima amanah sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 5 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada TW III tahun 2022 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan kinerjaku.kkp.go.id adalah 111.63 target kinerja pada TW III 2022 dapat tercapai sesuai target. Jika dibandingkan dengan capaian TW III tahun 2021 ada peningkatan nilai capaian yaitu 111,51 menjadi 111.63 atau naik 0.12 poin, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan beberapa indikator kinerja dan formulasi penghitungannya.

4.2. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2022, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang capaiannya belum maksimal, salah satu kegiatan yang harus ditingkatkan adalah pengawasan pelaku usaha berdasarkan Juknis terbaru yaitu PERDIRJEN 6 Tahun 2021 tentang pengawasan standar usaha dan produk dibidang perikanan guna mencapai target pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun target dalam RKA-KL.

4.3. Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2022 secara terarah dan terukur, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan pelaksanaan percepatan kegiatan guna menyesuaikan dengan rencana aksi dan target pada setiap triwulannya.

LAMPIRAN